

LAPORAN PENELITIAN STIMULUS



HUBUNGAN BILATERAL TIONGKOK-INDONESIA PERIODE SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Oleh :

Zulkarnain M.Si

Irma Indrayani, M.Si

JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NASIONAL

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Hubungan Bilateral Tiongkok-Indonesia Periode Susilo Bambang Yudhoyono**

Ketua :

Nama : **Zulkarnain , S.IP., M.Si**
Tempat/Tanggal Lahir : **Sipiongot / 23 Februari 1970**
NIDN : **0320027001**
Pangkat/Golongan : **Lektor/ III c**
Jabatan Fungsional : **Dosen Hubungan Internasional FISIP UNAS**
Alamat : **Jl. Munggang No. 22 Rt08/01**
Bale kambang, Jakarta Timur
No. HP:081284757944
E-mail: zulkarnainbolak@yahoo.com

Jangka Waktu : **6 bulan**
Biaya : **Rp1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

Mengetahui
Dekan FISIP UNAS,

Jakarta, 13 September 2016
Ketua,

(Dr. Truly Wangsalegawa., M.A., M.Ed.)

(Zulkarnain, S.IP., M.Si)

Menyetujui,
Wakil Rektor Bidang PPMK Universitas Nasional,

Prof. Dr. Ernawati Sinaga, M.S., Apt
NIP: 195507311981032001

Abstraksi

Penelitian ini membahas tentang pengaruh kebangkitan ekonomi Cina terhadap orientasi kebijakan luar negeri Indonesia. Melihat sejarahnya, hubungan antara Cina dan Indonesia yang dahulu sempat terputus tahun 1965 akibat pertentangan ideologis dan kecurigaan Indonesia terhadap dukungan Cina terhadap partai komunis Indonesia (PKI), namun kini hubungan tersebut mulai terjalin lagi semenjak tahun 1990-an yang diawali dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Kebijaksanaan politik luar negeri sebuah negara seringkali disebabkan oleh kombinasi kekuatan-kekuatan luar yang tak terduga dengan faktor-faktor struktural yang tidak baik. Kebuntuan hubungan bilateral Tiongkok – Indonesia yang terus berlanjut mempunyai akibat yang sama seriusnya bagi Tiongkok. Faktanya, kegagalan diplomatik Tiongkok terhadap Indonesia merugikan Tiongkok, dan kerugian itu tidak dapat ditutup dengan keuntungan diplomatik yang dihasilkan oleh pembukaan hubungan-hubungan baru dengan negara ASEAN yang lain.

Penelitian ini mencoba untuk membahas secara mendalam dengan menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan guna menemukan dua variabel yang menjadi topik dalam penulisan skripsi ini yaitu kebangkitan ekonomi Tiongkok dan pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

Kata kunci: Politik Luar Negeri, Perubahan, Kerjasama Ekonomi

KATA PENGANTAR

Penelitian tentang “HUBUNGAN BILATERAL TIONGKOK-INDONESIA PERIODE SUSILO BAMBANG YUDHOYONO” merupakan suatu tahapan baru dalam sejarah hubungan Tiongkok – Indonesia. Kebangkitan ekonomi Cina tentu berpengaruh terhadap orientasi kebijakan luar negeri Indonesia. Pada dasarnya terdapat dinamika hubungan antara Tiongkok dan Indonesia yang dahulu sempat terputus tahun 1965 akibat pertentangan ideologis dan kecurigaan Indonesia terhadap dukungan Cina terhadap partai komunis Indonesia (PKI), namun kini hubungan tersebut mulai terjalin lagi semenjak tahun 1990-an yang diawali dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pemikiran dari perspektif hubungan internasional.

September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan

Abstrak
i

Daftar Isiii

Kata Pengantar.....iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

BAB II TINJAUAN TEORI.....5

BAB III METODE PENELITIAN.....23

BAB IV KESIMPULAN..... 26

DAFTAR PUSTAKA 27

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh kebangkitan ekonomi Tiongkok terhadap orientasi kebijakan luar negeri Indonesia. Adapaun yang menjadi ketertarikan penulis dalam mengangkat topik ini ialah bahwa hubungan antara Tiongkok dan Indonesia yang dahulu sempat terputus tahun 1965 akibat pertentangan ideologis dan kecurigaan Indonesia terhadap dukungan Tiongkok terhadap partai komunis Indonesia (PKI), namun kini hubungan tersebut mulai terjalin lagi semenjak tahun 1990-an yang diawali dengan pertumbuhan ekonomi China yang melaju jauh dari apa yang diperkirakan sebelumnya.

Pada dasarnya kebijaksanaan politik luar negeri sebuah negara seringkali disebabkan oleh kombinasi kekuatan-kekuatan luar yang tak tertuga dengan faktor-faktor struktural yang tidak baik.¹ Kebuntuan hubungan bilateral Tiongkok – Indonesia yang terus berlanjut mempunyai akibat yang sama seriusnya bagi Tiongkok. Faktanya, kegagalan diplomatik Tiongkok terhadap Indonesia merugikan Tiongkok, dan kerugian itu tidak dapat ditutup dengan keuntungan diplomatik yang dihasilkan oleh pembukaan hubungan-hubungan baru dengan negara ASEAN yang lain.

Merujuk sejarah, pada waktu yang lalu pada saat Indonesia membuka hubungan bilateral dengan Tiongkok, kepentingan nasional yang di bawa oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Sukarno ialah untuk melaksanakan revolusi romantika ekonomi dan sosialnya di bawah demokrasi terpimpin. Selain itu, faktor utama yang mendorong Sukarno untuk membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok ialah mengenai pembentukan Malaysia

¹ John, Wong, Politik Perdagangan Tiongkok Di Asia Tenggara, Jakarta : Bumi Aksara, 1987, Hal. 50

yang dipandanganya sebagai ciptaan neo-kolonialis dan permainan kekuatan imperialis untuk menghalangi hegemoni Indonesia terhadap Negara- negara Malaya.

Dalam melancarkan kampanye konfrontasi untuk mengganyang Malaysia, Sukarno juga sangat membutuhkan sokongan diplomatik dan material dari Tiongkok. Selain itu kepentingan nasional Tiongkok dalam membina hubungan dengan Indonesia ialah untuk menangkis pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada awal tahun 1960-an, posisi internasional Tiongkok sangat terkucil karena permusuhan yang terus-menerus dengan amerika serikat dan keretakan politik dan ideologis dengan Uni Soviet, serta konflik dengan perbatasan dengan India. Oleh sebab itu Tiongkok sangat membutuhkan persekutuan dengan Indonesia untuk menempa NEFO (New Emergiming Forces atau kekuatan- kekuatan yang baru lahir) sebagai suatu “Front Bersatu”, dan Indonesia dalam perspektif Tiongkok mempunyai daya tarik tersendiri karena Tiongkok menganggap Indonesia sebagai suatu negara dengan potensi revolusioner penuh sehingga dapat berkoalisi dengan Tiongkok untuk menandingi blok Amerika dan Soviet.²

Setelah berakhirnya era perang dingin dengan berubahnya percaturan politik internasional yang ditandai oleh gugurnya ideologi komunisme dan semakin tegaknya ideologi demokrasi liberal, merupakan kajian yang sangat menarik dalam melihat hubungan bilateral antar Negara. Khususnya Tiongkok, setelah mengalami kesuksesan reformasi ekonominya di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping yang menerapkan konsep ekonomi pasar dan ekonomi terpusat, ternyata berdampak pula pada posisi Tiongkok di pergaulan internasional.³

Oleh sebab itu, dengan melihat beberapa fenomena yang terjadi pada Tiongkok, maka akan sangat menarik untuk di kaji secara mendalam terhadap hubungannya dengan kebijakan

² Ibid

³ Bakry, Umar, China Quo Vadis, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996

luar negeri Indonesia khususnya dalam bidang perdagangan internasionalnya. Kajian menjadi lebih menarik mengingat kondisi sosial politik yang terjadi pada saat ini sangat jauh berbeda pada saat Indonesia menjalin hubungannya dengan Tiongkok pada tahun 1960-an, serta kepentingan nasional yang merupakan landasan dalam politik luar negeri juga tentu sangat berbeda.

Penelitian ini mencoba untuk membahas secara mendalam dengan menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan guna menemukan dua variabel yang menjadi topik dalam penulisan skripsi ini yaitu kebangkitan ekonomi Tiongkok dan pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan studi ini adalah bagaimana pengaruh fenomena kebangkitan ekonomi Tiongkok terhadap orientasi kebijakan luar negeri Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan pembatasan masalah dengan tujuan untuk dapat menghasilkan uraian yang sistematis dan tidak melebar. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini membahas hubungan antara kebangkitan ekonomi Tiongkok dengan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia pada rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
2. Penelitian ini lebih menekankan pada kepentingan nasional yang menjadi landasan kunci bagi politik luar negeri Indonesia.

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tentang pengaruh kebangkitan ekonomi China terhadap orientasi kebijakan politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah:

1. Mendeskripsikan pengaruh kebangkitan Tiongkok terhadap orientasi kebijakan politik luar negeri Indonesia.
2. Mendeskripsikan secara sederhana apa implikasi dari orientasi kebijakan luar negeri tersebut terhadap kemakmuran suatu bangsa, khususnya Indonesia.

5. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa ilmu politik, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan kajian politik luar negeri.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang signifikan bahwa ada perubahan arah baru dalam tinjauan politik luar negeri Indonesia.
3. Sebagai pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam menata dan merumuskan kebijakan internasional.

BAB II TINJUAN TEORI

Politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan.⁴ Di tengah perkembangan dunia yang ditandai oleh saratnya kepentingan nasional masing-masing negara dalam proses negosiasi di tingkat bilateral, regional maupun multilateral maka akan penting bagi Indonesia untuk menentukan sikap dan menempatkan posisi yang tepat dan jelas.⁵

Pada pelaksanaannya dalam tataran domestik ada "kekuasaan, pemerintahan dan hukum", sedangkan politik internasional "adalah bidang kekuasaan, perjuangan, dan akomodasi".⁶ Target- target dalam politik luar negeri baik itu target jangka pendek maupun jangka panjang harus ditetapkan terlebih dahulu secara jelas sehingga biaya dan manfaatnya bisa lebih terukur dan transparan. Utamanya adalah bagaimana mengkaitkan strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan nasional dengan langkah-langkah yang ditempuh di tingkat internasional.⁷

Pada sistem politik internasional yang menegaskan perlunya kerangka kerja bagi aktivitas ekonomi, sehingga meskipun kekuatan-kekuatan ekonomi adalah nyata dan memiliki efek yang mendalam pada distribusi kekayaan dan kekuatan di dunia, kekuatan-kekuatan itu selalu bekerja dalam konteks perjuangan politik diantara kelompok- kelompok dan bangsa-bangsa.

Menurunnya politik kekuatan (power politics) pasca berakhirnya perang dingin banyak menaruh harapan akan datangnya iklim internasional yang lebih stabil, damai, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya perkembangan kemakmuran bangsa-bangsa berjalan

⁴ Susilo Bambang Yudhoyono, Menuju Perubahan, Jakarta : Relawan Bangsa, 2004, Hal. 89

⁵ Ibid.

⁶ Waltz, Theory of International Politics, New York : Mcgrawa Hill Reading, 1979, Hal. 113

⁷ Yudhoyono, Op.Cit., hal. 96

secara asimetris. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, menjalin hubungan dengan negara lain untuk menjalankan roda perekonomian suatu negara adalah mutlak dan perlu dilakukan. Dalam kondisi yang semakin mengglobal ini, diplomasi Indonesia menjadi kunci yang cukup penting. Kita dituntut untuk memberikan penjelasan tentang Indonesia ke negara luar. Untuk melangkah ke sana, diperlukan pemahaman tentang percaturan global, sehingga kita tidak terjebak dalam diplomasi yang involutif dan tetap mampu menunjukkan nasionalisme suatu Negara di tengah desakan internasionalisme yang semakin kuat.⁸

A. Kepentingan Nasional.

Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai suatu konsep yang harus diartikan sebagai power. Oleh sebab itu Morgenthau menunjuk kepentingan nasional berdasarkan definisi power, artinya bahwa posisi power yang harus dimiliki negara merupakan pertimbangan utama yang memberikan bentuk kepada kepentingan nasional. Konsekuensi dari pemikiran tersebut adalah bahwa suatu situasi atau tujuan nasional harus dievaluasi dan diukur dengan menggunakan tolok ukur posisi power negara.

Sementara itu hakikat kepentingan nasional menurut Frankel ialah sebagai keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan oleh suatu bangsa. Lebih lanjut Frankel mengatakan bahwa kepentingan nasional dapat melukiskan aspirasi negara, dan kepentingan nasional dapat dipakai secara operasional yang dapat dilihat aplikasinya pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktual serta rencana-rencana yang dituju.⁹ Dengan demikian baik kebijaksanaan maupun rencana yang dituju berorientasi kepada kepentingan nasional.

⁸ Robert Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord the World Political Economy*, Princeton : Princeton University Press, 1984, hal. 216

⁹ Frankel, *Teori Kontemporer Tentang Tingkah Laku Negara*, Jakarta : 1988, Hal. 35

Dalam praktek aktualnya, kepentingan nasional tidak hanya dibuat oleh seorang negarawan tetapi juga bisa dibuat oleh negarwan lain yang percaya bahwa Negara semata-mata hanya merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Kedua-duanya bisa saja membuat penafsiran yang sama mengenai kepentingan nasional, sepanjang negara benar-benar bertanggung jawab atas kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan nasional warga negaranya.

B. Perdagangan Internasional.

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu Negara dengan pemerintah negara lain. Batasan lain tentang perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang dan jasa kebutuhan antara dua negara atau lebih yang berbeda hukum dan kedaulatan dengan memenuhi peraturan yang diterima secara internasional. Perdagangan internasional memberikan keuntungan bagi negara-negara pelakunya, karena negara dapat menjual barang-barangnya ke luar negeri yang dapat meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan penduduknya.

C. Politik Luar Negeri

Kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan dalam forum internasional. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kepentingan

nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri. Menurut Coulombis dan Wolfe, politik luar negeri sintesis dari tujuan atau kepentingan nasional dengan power dan kapabilitas.¹⁰

Politik luar negeri pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu aparat pemerintah mempunyai pengaruh terhadap politik luar negeri. Disamping aparat pemerintah, kekuatan-kekuatan sosial politik yang lebih dikenal dengan pressure group ikut berpengaruh pula dalam pembentukan politik luar negeri suatu negara.

Tujuan politik luar negeri adalah untuk memujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran atau keadaan Negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan. Pemerintah suatu Negara menetapkan berbagai sarana yang diusahakan untuk dicapai dengan melakukan berbagai tindakan yang menunjukkan adanya kebutuhan, keinginan, dan tujuan.

Pelaksanaan politik luar negeri didahului oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan serta harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang di sertai oleh factor-factor nasional sebagai faktor internal dan faktor internasional sebagai faktor eksternal. Di samping itu, dalam pelaksanaan politik luar negeri harus dipilih teknik maupun instrumen yang cocok untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Variabel-Variabel Pada Pembentukan Politik Luar Negeri.

A Variabel Ideosinkretik

¹⁰ Thomas Coulombis dan John Wolfe, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Keadilan dan Power, Bandung: C.V. Abardin, 1990, Hal. 126

Variabel ideosinkritik berkaitan dengan gambaran dan karakter pribadi pembuat keputusan, antara lain mengenai ketenangan lawan ketergesaan, kemarahan lawan prudensi, ketakutan lawan percaya diri sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa karakter psikologis para pemimpin serta pembuat keputusan, demikian juga para pelaksana politik mempunyai pengaruh atas hasil politik, walaupun variabel ini diakui sangat sukar untuk diukur.

Dapat juga dikatakan bahwa variabel ideosinkretis relatif lebih mudah untuk menjelaskan keputusan-keputusan di negara-negara otoriter dan totaliter ketimbang di negara-negara demokrasi kompetitif. Sifat pribadi seorang pemimpin yang diktator mudah terefleksikan dari semua kategori keputusan daripada sifat pribadi pemimpin demokratis yang harus mendengar dan memperhatikan pendapat pihak lain. Disamping itu kita juga dapat berasumsi bahwa dampak variabel ideosinkretik lebih besar kepada keputusan-keputusan yang bersifat pragmatis yang dapat dilihat pada masa-masa krisis, keterbatasan waktu, ancaman yang menjadi beban di pundak para pemimpin negara beserta penasihatnya.

B. Variabel Peranan

Variabel peranan biasanya didefinisikan sebagai peraturan-peraturan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan pekerjaannya. Seseorang yang memegang peranan yang spesifik, hasil perilakunya dimodifikasi oleh harapan dan ekspektasi publik. Disamping para pemimpin oposisi sering membesar-besarkan perbedaan kebijaksanaan mereka terhadap kebijaksanaan yang sedang berkuasa, mereka juga cenderung mengemukakan janji-janji yang dibuat untuk memaksimalkan harapan dan ekspektasi para pemilih, tetapi setelah berkuasa cenderung membisu bahkan mendekati peran pendahulunya yaitu mereka yang berkuasa sebelumnya.

C. Variabel Birokratis

Variabel ini menyangkut struktur dan proses pemerintah serta efeknya terhadap politik luar negeri. Menurut Graham Allison dan Morton Halperin kompleksitas birokratis merupakan karakteristik yang terdapat pada hampir semua negara termasuk Negara terbelakang.

Para penstudi politik mengatakan bahwa disamping sebagian besar kebijaksanaan merefleksikan kepentingan-kepentingan biro-biro pemerintah, dinas-dinas militer dan divisi-divisi lainnya yang saling bertentangan, secara konstan juga bersaing untuk melindungi kelangsungan hidup serta pertumbuhan birokrasi mereka yang sempit dan memaksimalkan keterlibatan pengaruhnya dalam proses pembuatan keputusan.

D. Variabel Nasional

Variabel nasional mencakup berbagai atribut nasional yang mempengaruhi hasil politik luar negeri. Variabel ini telah banyak dibicarakan dalam membahas elemen-elemen power baik yang bersifat tangible maupun intangible.

Mengenai variabel nasional ini Coulumbis dan Wolfe secara khusus memberikan perhatian mereka mengenai variabel lingkungan, variabel kependudukan, variabel politik, variabel ekonomi, variabel sosial, dan variabel karakter nasional.

E. Variabel Lingkungan

Variabel lingkungan mencakup: luas, lokasi geografis, tipe daerah, iklim dan sumber alam. Bagi negara-negara continental, batas-batasnya mudah diserang, pilihan lokasinya harus strategis dengan mencari batas-batas yang relatif aman atau mencari daerah-daerah penyangga, atau mudah untuk memperoleh perlindungan dari negara-negara yang lebih kuat dan berkemampuan mobile.

F. Variabel Kependudukan

Variabel ini antara lain mengenai jumlah penduduk dan densitas penduduk suatu negara serta statistik yang vital seperti distribusi usia, negara, tingkat melek huruf dan kesehatan. Banyak negara yang padat penduduknya bertindak dengan tenang tetapi terdapat pula banyak negara seperti itu yang bertindak secara adventurist (berani) sehingga menurut Couloumbis dan Wolfe untuk variabel ini diperlukan adanya riset empiris.

G. Variabel Politik

Apakah tipe sistem politik suatu negara membawa dampak terhadap keputusan politik luar negeri dan implementasinya? Orang dapat menuduh bahwa kediktatoran berusaha bertualang ke luar negeri untuk membantu populasi domestik yang tertindas, dengan tipe solidaritas yang hanya bisa dihasilkan oleh ancaman eksternal yang serius.

Tetapi orang juga bisa mengatakan bahwa kediktatoran sangat hirau terhadap masalah ketertiban internal yang dikemukakannya kepada penduduk domestik yang memusuhinya sehingga memungkinkan untuk mencapai politik luar negeri dengan hati-hati yang dapat disetujui bersama yang bisa digunakan untuk mengurangi konflik eksternal dengan internalnya.

H. Variabel Ekonomi

Mengenai variabel ini, pada dasarnya dapat mengajukan pertanyaan pengaruh kapitalis, perekonomian yang berorientasi kepada pasar, pengaruh komunisme, dan tentang perencanaan ekonomi terhadap politik luar negeri. Ada yang menyatakan bahwa negara komunis yang perekonomiannya di kontrol oleh pusat akan lebih efektif dalam menyusun kebijaksanaan ekonomi luar negerinya sedemikian rupa untuk memajukan tujuan-tujuan politiknya. Sebaliknya ada yang menyatakan bahwa negara-negara kapitalis dimana aktornya

adalah swasta, jauh dari kontrol pemerintah, bisa membentuk politik luar negeri menurut kepentingan korporasi, bukan kepentingan nasional.

I. Variabel Sosial

Variabel sosial membawa kita untuk mengidentifikasi efek dari struktur kelas, distribusi pendapatan, status ras, budaya, dan agama terhadap politik luar negeri negara. Orang bisa mengatakan bahwa negara yang didalamnya terjadi perpecahan sosial atau etnis akan mengendalikan perpecahan terlebih dahulu sebelum memulai politik luar negeri yang ofensif.

J. Variabel Karakter Nasional

Karakter nasional merupakan konsep yang sukar dipahami. Stereotipe yang melecehkan melukiskan bahwa orang-orang Jerman dan Vietnam sebagai orang-orang yang suka perang, orang Perancis disebut sebagai orang yang sombong dan selalu bimbang, orang Inggris disebut sebagai hipokrit (munafik) dan suka berkomplot dengan diam-diam, orang-orang Soviet sering disebut sebagai orang yang perhitungan dan brutal, orang Amerika disebut sebagai kasar tetapi berterus terang.

Disamping ketidakpastian atas konsep karakter nasional, orang juga bisa mengatakan bahwa gaya nasional sebagai cara lain menyebut karakter nasional, mempunyai pengaruh terhadap politik luar negeri.

K. Variabel Sistemik

Oleh adanya hubungan dalam suatu sistem antara unit satu terhadap yang lain maka muncullah variabel sistemik. Disini perhatian diarahkan kepada variabel eksternal yang berpengaruh terhadap keputusan-keputusan politik luar negeri dari negara-negara yang kita amati atau analisis.

Politik luar negeri dari sistem yang dipengaruhi oleh system balance of power akan berbeda dari politik luar negeri dari negara-negara yang dipengaruhi oleh sistem bipolar perang dingin. Dengan kata lain bahwa system balance of power akan memberikan dampak yang berbeda daripada sistem bipolar perang dingin dalam sistem internasional terhadap politik luar negeri suatu negara.

Dalam sistem balance of power, politik luar negeri negara lebih fleksibel dan pragmatis karena sistem internasional dimana balance of power tersebut berada terbuka bagi perubahan-perubahan sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian politik luar negeri, sedangkan dalam sistem bipolar perang dingin sistem tersebut memberikan dampak apakah suatu negara terdesak untuk masuk ke dalam aliansi yang berorientasi ideologis.

Variabel sistemile bertalian erat dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan maupun tindakan negara lain di mana kebijaksanaan maupun tindakan tersebut dapat merangsang politik luar negeri negara lain. Para penstudi hubungan internasional beraliran tradisional beranggapan bahwa politik luar negeri merupakan sekumpulan respons terhadap tantangan dan kesempatan eksternal. Politik luar negeri tidak bias dipisahkan dari tujuan negara.

Adapun tujuan tersebut adalah untuk mempertahankan apa yang sudah dimiliki atau untuk mencapai serta memaksimalkan kesempatan-kesempatan dalam batas-batas prudensi guna memperoleh yang baru dan yang berkaitan dengan apa yang sudah dicapai. Respon yang diberikan oleh suatu negara terhadap tantangan maupun kesempatan yang terbuka tidak akan lepas dari tujuan negara.

Suasana Interaksi dalam pelaksanaan politik luar negeri, untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya, pemerintah dihadapkan kepada beberapa alternatif pemilihan instrumen. Instrumen-instrumen tersebut ada yang legal dan ada yang illegal. Instrumen yang legal bersifat kooperatif, keabsahaannya diakui serta sering dipergunakan,

misalnya diplomasi, sedangkan yang illegal tidak bisa diterima oleh pihak lain dan biasanya dipergunakan dalam kondisi yang memperlihatkan adanya oposisi, misalnya subversi.¹¹

¹¹ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipergunakan karena penelitian ini adalah proses menggambarkan kerangka politik luar negeri. Metodologi bukan hanya sekedar kumpulan metode atau teknik penelitian, melainkan suatu keseluruhan landasan nilai-nilai (khususnya yang menyangkut filsafat keilmuan), asumsi-asumsi, etika dan norma yang menjadi aturan-aturan yang dipergunakan untuk menafsirkan serta menyimpulkan data penelitian, didalamnya termasuk juga kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian.¹²

Dengan demikian metodologi penelitian tidak lepas dari suatu paradigma keilmuan. Lebih spesifik metodologi penelitian merupakan implikasi atau konsekuensi logis dari nilai-nilai, asumsi-asumsi, aturan-aturan, serta kriteria yang menjadi bagian integral dari suatu paradigma. Pada intinya setiap paradigma dapat dibedakan dari paradigma lainnya atas dasar sejumlah hal mendasar, antara lain konsepsi tentang ilmu-ilmu sosial ataupun asumsi-asumsi tentang masyarakat, manusia, realitas sosial, keberpihakan moral, dan juga komitmen terhadap nilai-nilai tertentu.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu upaya penyesuaian data dengan menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi dan disusun secara sistematis.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 51

3.3 Sifat Penelitian

Metode penelitian tersebut bersifat deskriptif analisis merupakan suatu metode yang menggambarkan atau memaparkan sekaligus menganalisa sebuah masalah. Maka jelaslah bahwa penelitian mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai materi dalam penelitian ini, kemudian data itu di analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut.¹³

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan studi kepustakaan. Cara ini merupakan Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, media massa, situs internet dan sumber lainnya, yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang teori-teori dan istilah-istilah serta pengertian-pengertian yang diperlukan. Pengumpulan data dalam penelitian studi politik luar negeri ini menggunakan data yaitu dokumentasi yaitu buku-buku, jurnal politik luar negeri, ataupun surat kabar.

Data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu sumber-sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan diskusi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari hasil olahan data orang lain baik berupa dokumen, laporan, publikasi, dan sebagainya.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses pengumpulan data (*on going analysis*) dengan menggunakan teknik analisa data yang lazim berlaku dalam penelitian kualitatif. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode *inductive analysis* dan *logical analysis* (Marshall & Rossman, 1989). Prosedur analisis data kualitatif

¹³ Moh. Nazir, *Op Cit*, hlm. 63

ini mengandung dua unsur utama, reduksi data dan interpretasi. Proses analisa data dalam penelitian kualitatif mencakup pengujian (*examining*), pemilihan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, melakukan sintesa, dan merenungkan kembali data (*completing the coded data*) yang dilakukan secara siklikal untuk membangun inferensi-inferensi, menguji kembali inferensi dan kemudian menarik kembali kesimpulan (Neuman, 1997).

Dalam istilah Neuman (2003) metode analisis yang berlangsung siklikal memberi peluang untuk terus menerus melakukan pengujian konsep dengan data-data dan bukti secara berulang-ulang untuk menemukan inferensi dan teori baru di sebut *successive appromiximation*. Selain itu, karena proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa konsep yang ada sebelumnya tentang kapital sosial, maka proses analisis data akan dilakukan juga dengan menggunakan metode ilustratif (*illustrative method*) dalam pengertian yang longgar. Dengan metode ilustratif peneliti mencoba menerapkan teori kepada suatu *setting* sosial atau situasi historikal yang kongkrit, atau mengorganisasikan data berdasarkan basis teori utama (*lihat* Neuman, 2003).

3.6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap Kerjasama Bilateral Tiongkok-Indonesia dalam Politik dan Perdagangan dengan department stake holder yang terlibat.

BAB III

ANALISIS

Dengan demikian dapat disimpulkan harus “mengakui dampak kesinambungan rezim internasional pada kemampuan negara-negara yang berbagi kepentingan untuk bekerjasama. Sejak pemerintahan orde baru, politik luar negeri Indonesia menganut teori lingkaran konsentris (concentric circles formula). Lingkaran konsentris pertama adalah ASEAN yang dianggap sebagai “corner stone” dari politik luar negeri Indonesia.¹⁴

Di luar lingkaran tersebut, Indonesia perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang tergabung dalam Pacific Island Forum, The South West Pacific Dialogue dan konsultasi tripartite diantara Indonesia, Australia dan Timor-Timur yang mencakup wilayah dalam lingkaran konsentris II. Termasuk di dalam lingkaran konsentris II adalah negara-negara yang tercakup dalam kerja sama ASEAN+3 (Jepang, Tiongkok Dan Korea Selatan). Diluar lingkaran tersebut, Indonesia mengkonsentrasikan kerja sama dengan negara-negara yang ekonominya maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Mencermati Tiongkok adalah penting, karena negara yang berpenduduk terbesar ini telah bangkit dari tidurnya selama berakhirnya perang dunia kedua. Pengaruh China terhadap dunia ini tampaknya begitu besar—sehingga secara paradoksial sulit bagi orang-orang yang ditugasi melihat gambaran besarnya untuk memahaminya. Berdasarkan segala ukuran, pertumbuhan ekonomi Cina tumbuh pesat. Untuk semua negara, laporan kemajuan ekonomi

¹⁴ Dewi Fortuna Anwar, *Indonesian Foreign Policy and Domestic Politics*, Singapore : ISEAS, 2003, hal. 7

tahunan dibuat dalam bentuk produk domestic bruto, yaitu jumlah nilai semua barang dan jasa yang diperdagangkan dalam perekonomian suatu negara.¹⁵

Pada tahun 2003, PDB China mencapai 41,4 triliun. Berdasarkan ukuran tersebut, Tiongkok adalah perekonomian terbesar ketujuh di dunia. Perekonomian Amerika Serikat sejauh ini masih merupakan yang terbesar di dunia; dengan PDB 2003 sebesar 410,1 triliun, perekonomian negara itu tujuh kali lebih besar daripada perekonomian Tiongkok.

Sejak Tiongkok mulai mereformasi perekonomiannya satu generasi lalu, negara itu telah tumbuh dengan angka resmi sebesar 9,5 persen. Negara manapun pada tahap-tahap awal reformasi perekonomiannya sering kali naik cepat, tetapi tidak seperti Tiongkok. Negara ini sedang mendekati kurun waktu perjalanan 30 tahun dan sepanjang waktu itu perekonomiannya telah berlipat-ganda hampir tiga kali lebih. Kenaikan tersebut tidak ada duanya dalam sejarah modern.¹⁶

Bagi negara-negara lain, pertumbuhan Tiongkok tersebut telah berperan penting sebagai pelanggan dan juga sebagai pemasok. Jepang dan Jerman baru-baru ini menikmati surplus perdagangan besar dengan negara tersebut karena sekarang Tiongkok adalah pembeli mesin pabrik terbesar di dunia, dan negara itu membutuhkan peralatan yang dibuat Jerman dan Jepang guna menghasilkan mesin-mesin dan barang-barang elektronik yang dibuat oleh Jerman dan Jepang. Negara-negara yang kaya dengan sumber daya benar-benar menjual bahan mentah kepada Tiongkok yang akan dibentuk kembali di pabrik-pabriknya, dan juga sumber energi yang diperlukannya untuk menjalankannya. Pada tahun 2003, menurut perhitungan Stephen Roach, pakar ekonomi utama di Morgan Stanley, rakyat Tiongkok membeli tujuh persen minyak dunia, seperempat dari semua semua aluminium dan baja, hampir sepertiga bijih besi dan batu bara dunia, dan 40 persen semen dunia.

¹⁵ Ali Alatas, 2006. Arah Baru Politik Luar Negeri Indonesia.

¹⁶ Kompas

Kecenderungannya ialah bahwa jumlah tersebut akan semakin meningkat pada masa-masa mendatang.

Merujuk pendapat Pakar ekonomi Jeffrey Sachs dari Universitas Columbia, yang menjadi penasihat berbagai negara menyatakan sudah pasti, jika ada suatu negara yang akan menggantikan Amerika Serikat di pasar dunia, hanya Tiongkok yang akan tampil ke depan, menganjurkan bangsa- bangsa harus dapat mengambil langkah yang positif untuk membangun hubungan kerjasama yang signifikan terhadap Tiongkok, karena dimana pada tahun 2050 perekonomian Tiongkok dapat mencapai 75 persen lebih besar daripada perekonomian sebelumnya.

Kondisi bangsa Indonesia kini tengah mengalami badai yang tak berkesudahan. Masih tingginya tingkat inflasi, kemiskinan, dan tidak kondusifnya keadaan Indonesia untuk investor, serta seringnya para politikus melakukan manuver-manuver politik yang tak bersahabat bagi kondisi saat ini, seakan menambah catatan kelam bangsa ini.

Sebuah bangsa dikatakan terhormat jika rakyatnya punya taraf hidup yang layak, bebas dari kemiskinan yang ekstrim, karena akan sangat tidak terhormat jika mayoritas penduduk Indonesia miskin bahkan mencapai kemiskinan yang absolut. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa diperlukan sepuluh langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang terhormat. Diantara 10 langkah tersebut, antara lain ialah Indonesia harus berperan aktif dalam hubungan internasional dengan tidak hanya memikirkan kondisi negara sendiri tetapi juga memikirkan kondisi negara lain yang cukup potensial untuk menjalin kerjasama bilateral.¹⁷

Pemerintahan Indonesia yang baru, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla memiliki mandat untuk melakukan perubahan

¹⁷ Susilo Bambang Yudhoyono, 8 Desember 2006, Perlu 10 Langkah Jadikan Indonesia Terhormat, Harian Analisa, hal. 1

yang sulit guna mengembalikan pemerintahan ke jalur yang benar. Dalam upaya memulihkan perekonomian nasional di tengah gelombang globalisasi ini, politik luar negeri perlu difokuskan pada kerjasama bilateral dengan negara-negara asia timur, ASEAN+3 (Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok), East Asia Community dan APEC pada tingkat regional, serta kelompok-kelompok tertentu pada tingkat global.

Sebagai negara yang sedang bangkit, Tiongkok merupakan mitra dagang dan pasar utama produk Indonesia melalui penyediaan berbagai bidang bahan baku yang diperlukan, serta menjadi sumber penting bagi penyediaan teknologi kecil dan menengah yang dimilikinya. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan pentingnya hubungan RI-China di masa mendatang, seperti tercermin dalam gagasannya tentang aliansi Indonesia, Tiongkok, India, Singapura dan Jepang.¹⁸

Pada pemerintahan SBY ini, kerjasama indonesia dengan Tiongkok diharapkan akan meningkat secara riil dengan dihasilkannya deklarasi kemitraan strategis antara Indonesia dan China. Indonesia mengharapkan China sebagai pasar potensial bagi berbagai produk kita sekaligus sumber penting bagi kebutuhan kita akan produk teknologi kecil dan menengah, termasuk produk teknologi persenjataan yang kita perlukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari departemen perekonomian sudah ada beberapa kerangka kerjasama yang signifikan dibangun antara pemerintah Tiongkok dengan pemerintah Indonesia antara lain ialah:

A. Kerjasama Politik dan Keamanan¹⁹

¹⁸ Smith, Gusdur and the Indonesian Economy, Singapore :ISEAS, 2001, Hal. 59

¹⁹ Departemen Perekonomian, 2006. Deklarasi Bersama Antara Republik Indonesia Dengan Republik Rakyat China Mengenai Kemitraan Strategis. ([http://www.ekon.go.id/v2/content/view/163/25/.](http://www.ekon.go.id/v2/content/view/163/25/))

1. Meningkatkan hubungan dan interaksi bilateral reguler tingkat tinggi sebagai upaya untuk memperbaiki kontak dan komunikasi serta untuk mempertinggi dialog mengenai topik-topik bilateral, kawasan, dan internasional yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, melalui:

- a. Membentuk mekanisme dialog pada tingkat Anggota Dewan Negara/ Menteri Koordinator bagi hubungan dan kerjasama yang lebih luas antara Indonesia dan Tiongkok;
- b. Mengkonsolidasikan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral Indonesia-Tiongkok (KBKB), yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, dalam mengkoordinasikan dan mengkaji kegiatan di dalam mekanisme dialog Indonesia-Tiongkok yang ada;
- c. Memperkuat peran konsultasi Indonesia-Tiongkok di tingkat Pejabat Tinggi dalam melaksanakan keputusan yang dibuat pada tiap tingkat mekanisme dialog bilateral serta dalam menyelidiki, bila dan ketika dibutuhkan dan berdasar pada kesepakatan bersama, kebutuhan mengenai mekanisme tambahan di berbagai bidang kerjasama pada tataran yang layak; dan
- d. Mendukung hubungan dan kontak langsung antara badan legislatif Indonesia dan Tiongkok serta koordinasi dan kerjasama mereka dalam organisasi parlemen internasional seperti Organisasi Antar Parlemen ASEAN (AIPO), Asosiasi Parlemen Asia untuk Perdamaian (AAPP), dan Uni Parlemen Dunia (IPU).

2. Terus mempromosikan saling pengertian dan dukungan sehubungan komitmen kami atas prinsip-prinsip penghargaan bersama atas kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah kedua negara. Tiongkok mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam upayanya menjaga persatuan nasional dan keutuhan wilayah. Indonesia menyatakan kembali ketetapanannya untuk terus berpegang pada kebijakan satu Tiongkok dan pengakuannya bahwa

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai pemerintah resmi satu-satunya yang mewakili seluruh Tiongkok dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China serta mendukung proses reunifikasi damai Tiongkok.

3. Menyokong upaya menuju reformasi yang efektif dan demokratisasi yang lebih luas atas sistem PBB, dengan maksud untuk meningkatkan multilateralisme, memperkuat peran PBB dalam menjaga dan meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional serta pembangunan yang berkelanjutan, dan juga menjamin keikutsertaan dan pembagian peran yang lebih luas di antara negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusannya.

4. Memperkuat kerjasama dengan negara-negara Asia dan Afrika melalui Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (NAASP) serta dengan negara-negara Gerakan Non-Blok (NAM) dan Kelompok 77 dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan dunia serta dalam memastikan bahwa negara-negara berkembang mendapatkan keuntungan penuh dari globalisasi.

5. Menegaskan kembali peran ASEAN dalam membangun kerjasama regional melalui penganjangan Komunitas ASEAN serta peran Tiongkok dalam menyokong upaya-upaya ASEAN melalui program-program seperti BIMP-EAGA.

6. Bekerja sama dalam mendorong seluruh negara Bersenjata Nuklir untuk menandatangani Protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. China akan menandatangani Protokol tersebut secepat mungkin segera setelah solusi atas pertanyaan yang belum terjawab mengenai

Protokol dimaksud tercapai dan diterima oleh seluruh pihak terkait.

7. Meningkatkan implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea sebagai cara untuk membuat Laut Tiongkok Selatan menjadi dasar kerjasama dan jembatan persahabatan.

8.Mempromosikan rasa saling percaya dan keyakinan dalam bidang pertahanan dan militer dengan maksud untuk membangun industri pertahanan masing-masing dan secara aktif menyelidiki kemungkinan untuk membentuk mekanisme konsultasi pertahanan dan keamanan.

9.Mendorong kerjasama antar badan penegakan hukum dan intelijen dalam menangani isu-isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, penyelundupan, perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia, pencucian uang, kejahatan dunia maya, dan kejahatan terorganisir transnasional lainnya melalui pelaksanaan perjanjian kerjasama yang telah ada; secara aktif mencari kemungkinan pembentukan mekanisme konsultasi; dan mempromosikan bidang kerjasama lainnya yang tepat dan sesuai dengan hukum nasional tiap-tiap negara.

10.Bekerja sama dengan erat pada isu maritim melalui perbaikan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan membangun mekanisme konsultasi dan kerjasama maritim.

11.Memperkuat kerjasama dalam upaya memberantas terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kedua negara menolak pengkaitan hubungan antara terorisme dengan salah satu agama atau kelompok etnis dan

menegaskan bahwa kampanye melawan terorisme harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memenuhi norma-norma hukum internasional yang diakui secara universal

B.Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

12.Mempromosikan kerjasama yang lebih besar pada tataran bilateral, regional, dan internasional dalam menopang pertumbuhan ekonomi dengan berdasar pada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling melengkapi, dan keanekaragaman untuk meningkatkan kemitraan ekonomi dan sekaligus mendirikan kemandirian ekonomi.

13. Memperkuat kerjasama dalam organisasi internasional untuk menjamin negara-negara berkembang mendapatkan secara penuh keuntungan dari sistem perdagangan multilateral dan proses perdagangan bebas secara adil dan berimbang. Kedua negara menekankan pentingnya penguatan kerjasama dalam upaya untuk merealisasikan Tujuan Milenium PBB dan tujuan serta target pembangunan yang telah disetujui secara internasional.

Pada pemerintahan SBY ini, kerjasama Indonesia dengan Cina diharapkan akan meningkat secara riil dengan dihasilkannya deklarasi kemitraan strategis antara Indonesia dan China. Indonesia mengharapkan China sebagai pasar potensial bagi berbagai produk kita sekaligus sumber penting bagi kebutuhan kita akan produk teknologi kecil dan menengah, termasuk produk teknologi persenjataan yang kita perlukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari departemen perekonomian sudah ada beberapa kerangka kerjasama yang signifikan dibangun antara pemerintah Cina dengan pemerintah Indonesia antara lain ialah:

A. Kerjasama Politik dan Keamanan

1. Meningkatkan hubungan dan interaksi bilateral reguler tingkat tinggi sebagai upaya untuk memperbaiki kontak dan komunikasi serta untuk mempertinggi dialog mengenai topik-topik bilateral, kawasan, dan internasional yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, melalui:

a. Membentuk mekanisme dialog pada tingkat Anggota Dewan Negara/ Menteri Koordinator bagi hubungan dan kerjasama yang lebih luas antara Indonesia dan Cina;

b. Mengkonsolidasikan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral Indonesia-Cina (KBKB), yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, dalam mengkoordinasikan dan mengkaji kegiatan di dalam mekanisme dialog Indonesia-Cina yang ada;

c. Memperkuat peran konsultasi Indonesia-Cina di tingkat Pejabat Tinggi dalam melaksanakan keputusan yang dibuat pada tiap tingkat mekanisme dialog bilateral serta dalam menyelidiki, bila dan ketika dibutuhkan dan berdasar pada kesepakatan bersama, kebutuhan mengenai mekanisme tambahan di berbagai bidang kerjasama pada tataran yang layak; dan

d. Mendukung hubungan dan kontak langsung antara badan legislatif Indonesia dan Cina serta koordinasi dan kerjasama mereka dalam organisasi parlemen internasional seperti Organisasi Antar Parlemen ASEAN (AIPO), Asosiasi Parlemen Asia untuk Perdamaian (AAPP), dan Uni Parlemen Dunia (IPU).

2. Terus mempromosikan saling pengertian dan dukungan sehubungan komitmen kami atas prinsip-prinsip penghargaan bersama atas kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah kedua negara. Cina mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam upayanya menjaga persatuan nasional dan keutuhan wilayah. Indonesia menyatakan kembali ketetapanannya untuk terus berpegang pada kebijakan satu Cina dan pengakuannya bahwa Pemerintah Republik Rakyat Cina sebagai pemerintah resmi satu-satunya yang mewakili seluruh Cina dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China serta mendukung proses reunifikasi damai Cina.

3. Menyokong upaya menuju reformasi yang efektif dan demokratisasi yang lebih luas atas sistem PBB, dengan maksud untuk meningkatkan multilateralisme, memperkuat peran PBB dalam menjaga dan meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional serta pembangunan yang berkelanjutan, dan juga menjamin keikutsertaan dan pembagian peran

yang lebih luas di antara negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusannya.

4. Memperkuat kerjasama dengan negara-negara Asia dan Afrika melalui Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (NAASP) serta dengan negara-negara Gerakan Non-Blok (NAM) dan Kelompok 77 dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan dunia serta dalam memastikan bahwa negara-negara berkembang mendapatkan keuntungan penuh dari globalisasi.

5. Menegaskan kembali peran ASEAN dalam membangun kerjasama regional melalui penganjuran Komunitas ASEAN serta peran Cina dalam menyokong upaya-upaya ASEAN melalui program-program seperti BIMP-EAGA.

6. Bekerja sama dalam mendorong seluruh negara Bersenjata Nuklir untuk menandatangani Protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Cina akan menandatangani Protokol tersebut secepat mungkin segera setelah solusi atas pertanyaan yang belum terjawab mengenai Protokol dimaksud tercapai dan diterima oleh seluruh pihak terkait.

7. Meningkatkan implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea sebagai cara untuk membuat Laut Cina Selatan menjadi dasar kerjasama dan jembatan persahabatan.

8. Mempromosikan rasa saling percaya dan keyakinan dalam bidang pertahanan dan militer dengan maksud untuk membangun industri pertahanan masing-masing dan secara aktif menyelidiki kemungkinan untuk membentuk mekanisme konsultasi pertahanan dan keamanan.

9.Mendorong kerjasama antar badan penegakan hukum dan intelijen dalam menangani isu-isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, penyelundupan, perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia, pencucian uang, kejahatan dunia maya, dan kejahatan terorganisir transnasional lainnya melalui pelaksanaan perjanjian kerjasama yang telah ada; secara aktif mencari kemungkinan pembentukan mekanisme konsultasi; dan mempromosikan bidang kerjasama lainnya yang tepat dan sesuai dengan hukum nasional tiap-tiap negara.

10.Bekerja sama dengan erat pada isu maritim melalui perbaikan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan membangun mekanisme konsultasi dan kerjasama maritim.

11.Memperkuat kerjasama dalam upaya memberantas terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kedua negara menolak pengkaitan hubungan antara terorisme dengan salah satu agama atau kelompok etnis dan menegaskan bahwa kampanye melawan terorisme harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memenuhi norma-norma hukum internasional yang diakui secara universal

Bab V

SIMPULAN

Politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan. Di tengah perkembangan dunia yang ditandai oleh saratnya kepentingan nasional masing-masing negara dalam proses negosiasi di tingkat bilateral, regional maupun multilateral maka akan penting bagi Indonesia untuk menentukan sikap dan menempatkan posisi yang tepat dan jelas. Dengan kata lain, kita harus “mengakui dampak kesinambungan rezim internasional pada kemampuan negara-negara yang berbagi kepentingan untuk bekerjasama.

Sejak pemerintahan orde baru, politik luar negeri Indonesia menganut teori lingkaran konsentris (*concentric circles formula*). Lingkaran konsentris pertama adalah ASEAN yang dianggap sebagai “corner stone” dari politik luar negeri Indonesia. Di luar lingkaran tersebut, Indonesia perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang tergabung dalam Pacific Island Forum, The South West Pacific Dialogue dan konsultasi tripartite diantara Indonesia, Australia dan Timor-Timur yang mencakup wilayah dalam lingkaran konsentris II. Termasuk di dalam lingkaran konsentris II adalah negara-negara yang tercakup dalam kerja sama ASEAN+3 (Jepang, Cina Dan Korea).

Daftar Pustaka

- John, Wong, Politik Perdagangan Tiongkok Di Asia Tenggara, Jakarta : Bumi Aksara, 1987
- Bakry, Umar, China Quo Vadis, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Susilo Bambang Yudhoyono, Menuju Perubahan, Jakarta : Relawan Bangsa, 2004
- Waltz, Theory of International Politics, New York : Mcgrawa Hill Reading, 1979
- Frankel, Teori Kontemporer Tentang Tingkah Laku Negara, Jakarta : 1988
- Departemen Perekonomian, 2006. Deklarasi Bersama Antara Republik Indonesia Dengan Republik Rakyat China Mengenai Kemitraan Strategis.
([http://www.ekon.go.id/v2/content/view/163/25/.](http://www.ekon.go.id/v2/content/view/163/25/))
- Smith, Gusdur and the Indonesian Economy, Singapore : ISEAS, 2001
- Robert Keohane, After Hegemoni: Cooperation and Discord the World Political Economy, Princeton : Princeton University Press, 1984
- Dewi Fortuna Anwar, Indonesian Foreign Policy and Domestic Politics, Singapore : ISEAS, 2003
- Ali Alatas, 2006. Arah Baru Politik Luar Negeri Indonesia.